

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Pasolong (2007), Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Konsep efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat (Siagian, 1987), termasuk dalam efektivitas pengendalian kebakaran hutan.

Kebakaran hutan di Indonesia saat dipandang sebagai peristiwa bencana regional dan global, karna dampak kebakaran hutan sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer berpotensi menimbulkan pemanasan global (Adinugroho, *et al.*, 2004). Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana kebakaran hutan. Adapun data kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data kerusakan lahan gambut Provinsi Jambi Tahun 2015-2017

Kabupaten	Jumlah KHG	Prioritas Pemilihan KHG	Status Kerusakan Ekosistem Gambut					Luas Total (Ha)
			Tidak Rusak	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sangat Berat	
Kota Jambi	3	Prioritas I	0	1,611	0	0	0	1,611
		Prioritas IV	0	1,078	0	0	0	1,078
Merangin	2	Prioritas I	0	779	949	90	0	1,818
		Prioritas II	0	1,181	367	143	0	1,691
Muaro Jambi	7	Prioritas I	94	230,466	58,775	22,444	2,654	314,433
		Prioritas II	0	143	0	0	0	143
		Prioritas IV	0	54	0	0	0	54
Sarolangun	3	Prioritas I	0	10,575	11,242	5,869	79	27,765
		Prioritas II	0	12,901	8,875	2,095	0	23,871
Tanjung Jabung Barat	5	Prioritas I	386	91,710	18,438	22,310	70	132,914
		Prioritas II	495	87,539	13,955	9,899	202	112,090
Tanjung Jabung Timur	4	Prioritas I	420	187,970	37,094	16,406	549	242,439
		Prioritas II	64	9,738	1,493	87	0	11,382
Jumlah	24		1,459	635,745	151,188	79,343	3,554	871,289

Sumber: KLHK, 2017

Data diatas menunjukkan bahwa total lahan yang rusak mencapai lebih dari 871.000 Ha. Kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu wilayah yang menyumbang kebakaran hutan adalah TAHURA Orang Kayo Hitam yang diketahui apabila pada musim kemarau yang berkepanjangan maka wilayah tersebut akan terbakar dikarenakan faktor dari jenis tanaman bawahnya yang berupa ilalang, semak belukar, dan rumput kering.

TAHURA Orang Kayo Hitam memiliki luas 21.160 ha (Febriani et al., 2017). Kebakaran di TAHURA ini pada September tahun 2015 seluas 19.051 ha menyisakan tutupan lahan hutan rawa gambut sekunder seluas 2.109 ha atau 10 % dari total luas lahan di arah timur kawasan TAHURA yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak-Sembilang. Kebakaran ini memusnahkan tanaman jelutung yang telah ditanam saat kegiatan rehabilitasi kawasan.

Kebakaran mengancam kelestarian sumber plasma nutfah, khususnya stadia pohon yang menjadi sumber benih untuk pemulihan kawasan dan mengancam fungsi dari ekosistem gambut sebagai penyimpan air dan karbon (Tamin et al., 2018). Berdasarkan informasi dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi, pada tahun 2019 terjadi kebakaran di TAHURA Orang Kayo Hitam dengan luas kebakaran 7.984,78 ha. Jika dibandingkan dengan data total kebakaran di tahun 2019, luas kebakaran ini sebesar 68% dari total lahan. Artinya, pelaksanaan program MPA Desa Sungai Bungur yang dekat dengan TAHURA Orang Kayo Hitam perlu dievaluasi terkait pengendalian karhutla karena ukuran kebakaran tersebut cukuplah material.

Banyaknya dampak negatif dari kebakaran hutan membuat diperlukan adanya kegiatan pengendalian kebakaran hutan agar dampaknya tidak meluas. Pengendalian kebakaran hutan (Adinugroho et al., 2004) merupakan semua aktivitas untuk melindungi hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan hutan. Pengendalian kebakaran hutan mencakup tiga komponen, yaitu mencegah terjadinya kebakaran hutan, memadamkan kebakaran hutan dengan segera sewaktu api masih kecil, penggunaan api hanya untuk tujuan-tujuan tertentu dalam skala terbatas. Pengendalian kebakaran hutan juga melibatkan masyarakat peduli api. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan (PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN, 2013). MPA yang ada disekitar TAHURA Orang Kayo Hitam adalah MPA Desa Sungai Bungur yang di bentuk pada tahun 2017 oleh Kepala Desa Sungai Bungur.

Menurut Sayendri (2016) keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu upaya pengamanan hutan untuk pengelolaan hutan lestari, akan tetapi MPA sebagai aktor penting di lingkungan masyarakat dalam pelaksana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena kurangnya fasilitas dan akses penguatan kelembagaan, sehingga dapat menurunkan keseriusan dari MPA dalam berpartisipasi sehingga pencapaian tujuan pengendalian karhutla dapat dikatakan

kurang efektif. Hal ini yang terjadi di tahun 2019 dan tahun 2020, Karhutla terjadi di Provinsi Jambi. Selain itu Provinsi Jambi tentang kelompok MPA dalam melaksanakan tugasnya masih sangat sedikit.

Dalam penelitian ini, kondisi kelembagaan sendiri adalah informasi yang merepresentasikan keadaan lembaga mulai dari terbentuk hingga upaya-upaya pengembangan dan penguatan kelembagaan, termasuk dalam sarana dan prasarannya. Sedangkan yang dimaksud dalam efektivitas merupakan penilaian apakah program kerja yang sudah dijalankan oleh MPA Desa Sungai Bungur sudah tepat sasaran dan memberikan dampak sesuai fungsi MPA dalam aktivitas pengendalian karhutla, dengan membandingkan secara kuantitatif dan kualitatif antara kondisi kelembagaan dan interpretasi dari masyarakat.

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Api di Desa Sungai Bungur”** dengan harapan memberi evaluasi kelompok MPA tersebut mengenai efektivitas melaksanakan program kerja dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di sekitar TAHURA Orang Kayo Hitam.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kelompok MPA di Desa Sungai Bungur?
2. Bagaimana efektivitas program kerja kelompok MPA di Desa Sungai Bungur?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi kelompok MPA di Desa Sungai Bungur.
2. Mengetahui efektivitas program kerja kelompok MPA di Desa Sungai Bungur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di sekitar TAHURA Orang Kayo Hitam, sehingga akan menjadi bahan masukan dan alternatif pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan program pengelolaan lingkungan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas dan instansi terkait tentang efektivitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di sekitar TAHURA Orang Kayo Hitam dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Sebagai pemicu bagi MPA untuk meningkatkan fungsinya sebagai pihak terdepan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.